

PERAN SEKTOR PERIKANAN SEBELUM DAN SETELAH PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DI JAWA TENGAH

*The Role of Fisheries Sector Before and After the Implementation of Regional
Otonomy in Central Java*

Adhyaksa Dault¹, Abdul Kohar M² dan Agus Suherman²

¹Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Imam Bardjo SH No 5 Semarang

²Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK UNDIP
Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
Jl. Hayam Wuruk No. 4A, Semarang

Diserahkan : 16 September 2007; Diterima : 11 Februari 2008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberlakuan otonomi daerah di Jawa Tengah terhadap permintaan, penawaran, output, nilai tambah dan struktur perdagangan pada perekonomian dan sektor perikanan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan data sekunder dari Tabel Input Output Jawa Tengah Transaksi Domestik atas Dasar Harga Produsen Klasifikasi 19 Sektor Tahun 1993, 2000, 2004 dan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2000 di Jawa Tengah berpengaruh terhadap perekonomian maupun sektor perikanan antara lain terhadap permintaan dan penawaran, output, nilai tambah dan struktur perdagangan. Pengaruh tersebut tercermin dari nilai permintaan, penawaran, output, nilai tambah dan struktur perdagangan yang mengalami penurunan setelah pemberlakuan otonomi daerah, bahkan kenaikan yang terjadi setelah pemberlakuan otonomi daerah masih dibawah kondisi sebelum pemberlakuan otonomi daerah.

Kata Kunci : Otonomi daerah, tabel input output, perikanan, Jawa Tengah

ABSTRACT

The objectives of this research is to find out the character of fisheries sector, before and after the act of regional in Central Java otonom. A discriptive method was apply by using secondary data from Central Java Input Output Table Data, Domestic Transaction Based on Producer Price 19 Sector year 1993, 2000, 2004 and 2007. The results showed that the Regional Autonom Act since 1 January 2000 in Central Java influenced the monetary, and others fisheries sectors, such as on the supply and demand, output, added value and trading structure. Those impacts were shown by the decreasing of trade structure after the regional otonom act

Keywords : Regional otonomy, input output table, fisheries, Central Java

PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan pembangunan, khususnya dalam bidang pemerintahan telah dimulai sejak ditetapkannya Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah maju (*progressive*), khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai

pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang dirasakan masih kurang aspiratif. Prinsip dasar kebijakan tersebut adalah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintahan pada era otonomi daerah melalui

implementasi UU No. 22/1999 yang telah dilaksanakan per 1 Januari 2000 tersebut pada tingkat penyelenggaraannya menimbulkan berbagai permasalahan sebagai akibat penafsiran yang belum sesuai dengan makna otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap materi UU No. 22/1999 sekaligus menggantikannya dengan menetapkan kebijakan baru melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar dari kebijakan tersebut mengatur kewenangan pangkal Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sehingga diharapkan dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Demikian pula halnya dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan atau dalam UU No.32 tahun 2004 diistilahkan sebagai mengelola sumber daya di wilayah laut telah dijelaskan pada pasal 18. Disebutkan pada pasal 18 ayat 3, bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, antara lain dalam hal : eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Dengan demikian dalam bidang pengelolaan sumberdaya di wilayah laut dapat selenggarakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi kepentingan masyarakat.

Pertanyaannya adalah apakah pola pembangunan daerah-daerah yang mempunyai potensi sumberdaya di wilayah laut selama ini berjalan dengan mengandalkan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu potensi dasar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sangat menarik untuk dibahas mengingat apa yang terjadi setelah pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan daerah terhadap wilayah laut semakin mengemuka dalam 5 tahun ini dan adanya kasus-kasus *illegal fishing*. Kondisi ini dapat terjadi salah satu penyebabnya adalah adanya salah tafsir oleh beberapa daerah terhadap pemahaman pasal 18 ayat 4 tentang Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, 12 mil untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Bagaimana dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah yang berbatasan

langsung dengan laut dan memiliki potensi perairan yang besar, antara lain :

- a. Jawa Tengah memiliki perairan yang potensial bagi usaha perikanan, terutama perikanan tangkap di sepanjang pantai utara dan selatan Jawa Tengah, sumberdaya ikan yang terdapat di perairan Jawa Tengah dengan luas sebaran 72 000 km² pada Laut Jawa disebelah utara Jawa Tengah dan 589 000 km² pada Samudera Hindia di sebelah selatan Jawa Tengah dengan memiliki spesies ikan dalam berbagai jenis maupun potensi yang lain seperti hutan mangrove.
- b. Pesisir utara Jawa Tengah dengan garis pantainya sepanjang \pm 453.9 km yang membentang dari Kabupaten Brebes di sebelah barat hingga Kabupaten Rembang di timur merupakan daerah potensial bagi pengembangan tambak, karena pantai yang landai dan sungai yang bermuara di wilayah pantai utara, merupakan aset bagi pembangunan Jawa Tengah.
- c. Dari 35 kabupaten dan kota, ada 16 kabupaten dan kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, baik di pantai utara Jawa maupun pantai selatan Jawa.

Mengacu pada hal-hal yang diatas, maka pembangunan sektor perikanan menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan keberadaan sektor perikanan dalam perekonomian Jawa Tengah, apakah sejak pemberlakuan otonomi daerah 1 Januari 2000, peran sektor perikanan mengalami kenaikan, tidak mengalami perubahan atau justru mengalami penurunan.

Keperluan untuk menggunakan analisis IO dalam perencanaan pembangunan daerah semakin terasa penting jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Salah satu ciri utama otonomi daerah, sebagaimana yang tersirat dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya dengan UU Nomor 32 tahun 2004, adalah daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya sendiri untuk pembiayaan pembangunan daerah. Permasalahan banyak muncul ketika perencana pembangunan daerah mulai menyusun anggaran pembangunan sektoral. Disini sering terjadi penempatan anggaran pembangunan sektoral selalu tidak sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Sektor-sektor yang sebenarnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah malah disuntik dana pembangunan lebih sedikit dibandingkan sektor-sektor yang kurang berperan terhadap

perekonomian setempat. Akibatnya, selama masa otonomi daerah yang berjalan kurang lebih sudah 9 tahun ini, kita melihat banyak daerah yang hanya menghambur-hamburkan uangnya tanpa ada hasil yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Untuk itu dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah terhadap sektor perikanan, yang difokuskan pada dampak permintaan dan penawaran sektor, output, nilai tambah dan struktur perdagangan. Kajian ini menggunakan Tabel Input Output (IO) yang diterbitkan tahun 1993 dan 2000 (sebelum pelaksanaan otonomi daerah) serta tahun 2004 dan 2007 (sebelum pelaksanaan otonomi daerah).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah, dan berbagai sumber lain yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian adalah data Tabel input output Jawa Tengah tahun 1993, 2000 (untuk menganalisis sebelum otonomi daerah), 2004 dan 2007 (yang merupakan hasil *up dating*) untuk menganalisis setelah otonomi daerah serta data lainnya yang dapat mendukung analisis dan pembahasannya.

Analisis Data

Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu daerah dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, maka fokus terhadap pembangunan dan dampaknya kepada kehidupan perekonomian masyarakat menjadi salah satu hal yang penting. Oleh karena itu, peran sektor perikanan dalam perekonomian Jawa Tengah menjadi penting agar dapat menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi yang sebenarnya. Perubahan kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, seperti adanya kebijakan otonomi daerah yang serta merta akan mempengaruhi perubahan peran dalam struktur perekonomian. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis jejak perubahan tersebut adalah dengan Tabel Input Output. Di Jawa Tengah penerbitan Tabel Input Output dilakukan lima tahun sekali antara lain

pada tahun 1993, 2000, dan 2004. Dengan adanya Tabel IO tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik perubahan sektor perikanan karena adanya kebijakan otonomi daerah.

Sebagai suatu model yang bersifat kuantitatif, I-O bisa juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai (BPS, 1995) :

- 1]. Struktur perekonomian nasional atau regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor.
- 2]. Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi.
- 3]. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berskala impor.
- 4]. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi investasi dan ekspor.

Jhingan (1990) mencoba menjelaskan model Input-Output, yaitu suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi, dan pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wassily W. Leontief pada tahun 1951. Model Input-Output lebih merupakan pendekatan keseimbangan umum daripada pendekatan keseimbangan parsial yang digunakan dalam model Keynesian atau model Ad-hoc. Pada dasarnya model ini menelaah hubungan antar industri (sektor) untuk melihat saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian dalam upaya mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Hubungan input-output mempunyai makna bahwa output suatu sektor akan menjadi input sektor lainnya.

BPS (2003), mengilustrasikan penyusunan Tabel Input-Output sebagai dasar pengembangan model Input-Output. Tabel Input-Output mempunyai tiga submatrik (disebut juga sebagai kuadran), sebagai berikut :

X_{ij} (Kuadran I)	F_{ik} (Kuadran II)
V_{mj} (Kuadran III)	

Gambar 1. Tiga Kuadran dalam Tabel Input Output

- Submatriks I, menggambarkan transaksi antar industri; output sektor i menjadi input sektor j (kuadran I).
- Submatriks III (kuadran), menggambarkan transaksi antara pihak-pihak pemilik faktor produksi (tenaga kerja, pemilik modal) dengan unit-unit ekonomi yang menggunakannya.

Tabel 1. Kerangka Tabel IO dengan Sektor 3x3

Input	Output	Permintaan Antara			Sub Total	Permintaan Akhir				Total
		1	2	3		C	G	I	E	
Sektor 1		x_{11}	x_{12}	x_{13}	$x_{1.}$	C_1	G_1	I_1	E_1	X_1
Sektor 2		x_{21}	x_{22}	x_{23}	$x_{2.}$	C_2	G_2	I_2	E_2	X_2
Sektor 3		x_{31}	x_{32}	x_{33}	$x_{3.}$	C_3	G_3	I_3	E_3	X_3
Sub Total		$x_{.1}$	$x_{.2}$	$x_{.3}$	$x_{..}$	C.	G.	I.	E.	X.
Impor		M_1	M_2	M_3	$M_{.}$	M_C	M_G	M_I	-	M
Upah		W_1	W_2	W_3	$W_{.}$	-	-	-	-	-
Pajak		T_1	T_2	T_3	$T_{.}$	T_C	-	T_I	T_E	T
GOS		S_1	S_2	S_3	$S_{.}$	-	-	-	-	-
Sub Total		V_1	V_2	V_3	$V_{.}$					
Total		X_1	X_2	X_3	$X_{.}$					
Employment		L_1	L_2	L_3	$L_{.}$					

Keterangan :

1. C = konsumsi rumah tangga/swasta, G = konsumsi pemerintah, I = pembentukan modal (investasi) dan E = ekspor, C + G + I + E = permintaan akhir.
2. x_{ij} = besarnya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j, dan F_i (C_i, G_i, I_i, E_i) = besarnya output sektor i yang digunakan sebagai permintaan akhir.
3. Koefisien langsung, $a_{ij} = x_{ij} / X_j$, $x_{ij} = a_{ij} X_j$, matriks A = [a_{ij}]
4. $x_{i.} + C_i + G_i + I_i + E_i = X_i$ dan $x_{.j} + W_j + T_j + S_j + M_j = X_j$ atau $\sum x_{ij} + F_i = X_i$
5. $\sum x_{ij} + F_i = X_i$
 $\sum a_{ij} X_j + F_i = X_i \rightarrow$ dalam persamaan matriks: $AX + F = X \rightarrow X - AX = F \rightarrow (I - A) X = F \rightarrow X = (I - A)^{-1} F$

$$6. \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ (I - A)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F \end{pmatrix}$$

- Submatriks II (kuadran II), menggambarkan transaksi antara konsumen akhir (rumah tangga, pemerintah, investor dan ekspor) dengan industri penghasil barang dan jasa.

Untuk penjelasan yang lebih ilustratif, diberikan kerangka Tabel IO dalam ukuran sederhana 3x3, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Analisis Diskriptif

Analisis tabel-tabel dasar ini diperlukan dalam membuat analisis diskriptif. Tabel dasar IO Jawa Tengah tahun 1993, 2000, 2004 dan 2007 pada dasarnya adalah tabel yang menyajikan informasi statistik yang menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi di Propinsi Jawa

Tengah. Beberapa variabel atau indikator dapat di analisis dalam tabel-tabel dasar, seperti :

1. Struktur penawaran dan permintaan, dan sekaligus melihat peranan produksi domestik dan impor untuk memenuhi permintaan barang dan jasa.
2. Struktur output dapat menggambarkan peranan output sektoral dalam perekonomian.
3. Struktur nilai tambahnya, berguna untuk melihat peranan masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah.
4. Struktur permintaan akhir (*final demand*) yang dirinci berdasarkan komponennya, yaitu: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok, dan ekspor.

- Perdagangan (ekspor dan impor) yang dilakukan oleh masing-masing propinsi ke propinsi lain atau luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum perekonomian Jawa Tengah dapat dilihat melalui data Tabel Input Output, yaitu melalui matrik pada kuadan I, II dan III. Gambaran umum tersebut dapat diketahui antara lain mengenai produksi, Produk Domestik Reginal Bruto (PDB), konsumsi, dan total permintaan maupun pengeluaran.

Struktur Permintaan dan Penawaran

Permintaan terhadap barang dan jasa pada suatu wilayah pada periode waktu tertentu

adalah merupakan seluruh permintaan yang digunakan oleh sektor produksi (permintaan antara), permintaan untuk memenuhi konsumsi akhir domestik (permintaan akhir), dan permintaan untuk ekspor. Sedangkan kalau dilihat dari sisi penawaran, adalah merupakan seluruh penawaran barang dan jasa pada suatu wilayah pada waktu tertentu yang berasal dari produksi lokal (barang dan jasa yang diproduksi di daerah tersebut), impor domestik (barang dan jasa yang diimpor dari daerah lain dalam satu negara) dan barang dan jasa impor dari luar negeri).

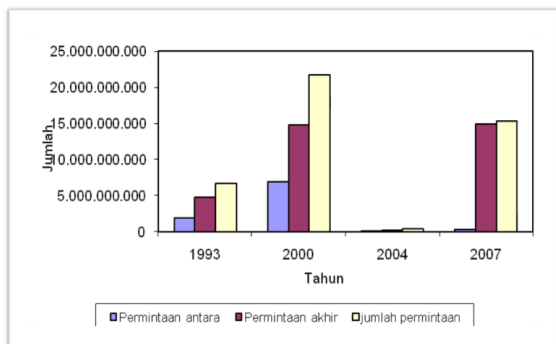
Tabel 2. Struktur Permintaan Antara, Permintaan Akhir dan Jumlah Permintaan, pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004 dan 2007.

No	Struktur	Tahun			
		1993	2000	2004	2007
1	Permintaan antara	1 886 654,80	6 929 633,89	138 630,43	344 767,74
2	Permintaan akhir	4 788 981,03	14 749 395,64	261 917,81	14 942 882,04
3	jumlah permintaan	6 675 635,83	21 679 029,53	400 548,24	15 287 649,78

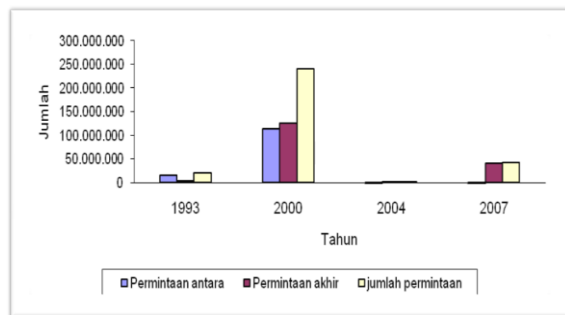
(Ribu Rupiah)

Tabel 3. Kontribusi Sektor Perikanan pada Struktur Permintaan Antara, Permintaan Akhir dan Jumlah Permintaan dalam Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah.

No	Sektor Perikanan	Tahun			
		1993	2000	2004	2007
1	Permintaan antara	16127757,00	114106170,00	814760,80	1517538,74
2	Permintaan akhir	3450568,00	125896125,00	1641700,13	40243780,08
3	jumlah permintaan	19578325,00	240002295,00	2456460,93	41761318,82



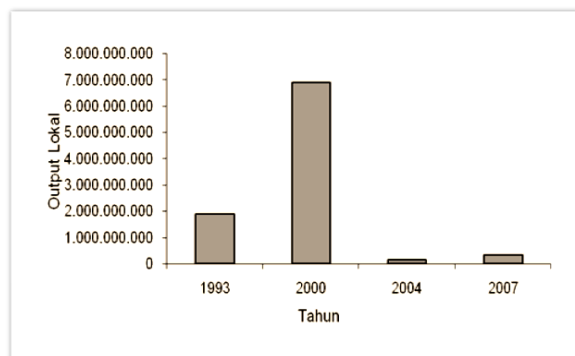
Gambar 2. Struktur Permintaan Antara, Permintaan Akhir dan Jumlah Permintaan, pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004 dan 2007



Gambar 3. Kontribusi Sektor Perikanan pada Struktur Permintaan Antara, Permintaan Akhir dan Jumlah Permintaan Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Tabel 4. Pertumbuhan Output Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

No	Tahun	Output lokal (milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1993	1 886 654,80	
2	2000	6 929 633,89	72,77
3	2004	138 630,43	-4 898,64
4	2007	344 767,74	59,79



Gambar 4. Pertumbuhan Output Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Struktur Output

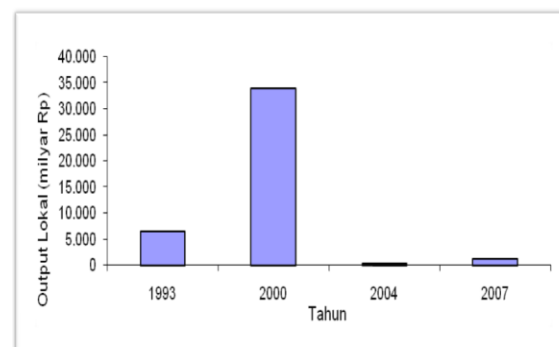
Pengertian output disini adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di propinsi Jawa Tengah. Analisis struktur output ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sektor-sektor mana saja yang mampu memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian di Jawa Tengah, dan bagaimana dengan kondisi pada sektor perikanan. Struktur output propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran 1. (pada kolom output lokal).

Tabel 5. Pertumbuhan Output Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

No	Tahun	Output lokal (milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1993	6 591,09	
2	2000	33 931,24	80,58
3	2004	449,87	-7 442,45
4	2007	1 271,97	64,63

Total nilai produksi barang dan jasa yang produksi oleh sektor-sektor ekonomi di Jawa Tengah mencapai Rp 1.886.654,80 milyar rupiah pada tahun 1993, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2000 menjadi Rp 6 929 633,89 milyar rupiah, akan tetapi pada tahun

2004 mengalami penurunan menjadi Rp 138 630,43 milyar rupiah.



Gambar 5. Pertumbuhan Output Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Tabel 6. Pertumbuhan Nilai Tambah pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

No	Tahun	Nilai Tambah (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1	1993	3 397 890,92	
2	2000	11 775 048,50	71,14
3	2004	193 435,26	-5987,33
4	2007	11 168 870,05	98,27

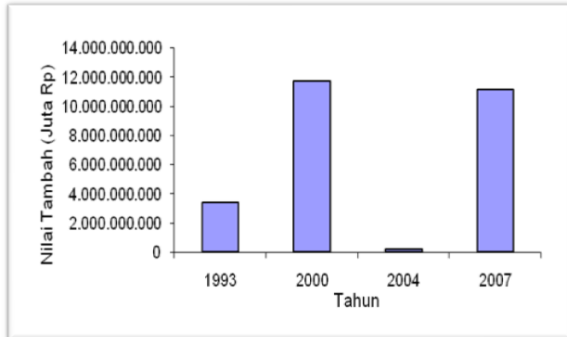
Tabel 7. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

No	Tahun	Nilai Tambah (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1	1993	42 391,61	
2	2000	199 428,41	78,74
3	2004	1 972,64	-10009,74
4	2007	201 163,19	99,02

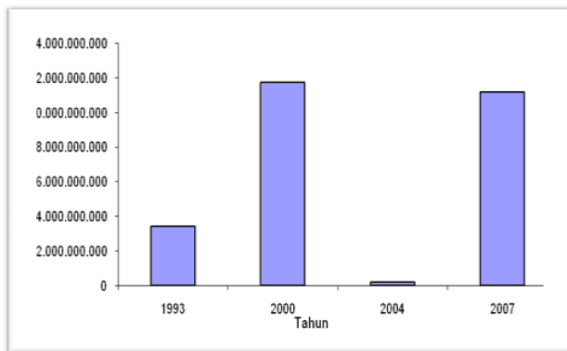
Struktur Nilai Tambah

Nilai tambah bruto adalah balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. Dalam tabel I-O multiregional ini, nilai tambah dirinci lagi menurut: (1) upah dan gaji, (2) surplus usaha (sewa, bunga dan keuntungan), (3) penyusutan dan (4) pajak tidak langsung. Besarnya nilai tambah di tiap-tiap sektor ditentukan secara bersamaan oleh besarnya output (besarnya nilai produksi) yang dihasilkan dalam proses produksi dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, suatu sektor yang memiliki nilai output besar belum

tentu memiliki nilai tambah yang juga besar, karena masih tergantung pula dari berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan. Struktur nilai tambah bruto sektor produksi di Jawa Tengah secara lengkap disajikan pada Lampiran 4.



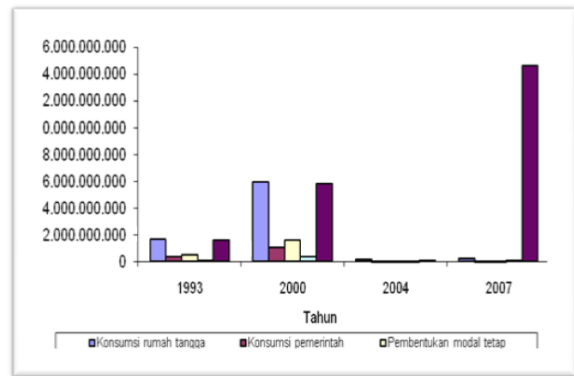
Gambar 6. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah



Gambar 7. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Struktur Konsumsi Akhir

Barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah, selain digunakan dalam proses produksi (sebagai permintaan antara) juga dipergunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh konsumen akhir. Konsumsi akhir tersebut meliputi : (1) konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, (2) konsumsi pemerintah (pusat dan daerah), (3) investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan swasta, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor ke luar daerah atau luar negeri. Apabila seluruh komponen permintaan akhir ini dijumlahkan dan dikurangi dengan jumlah barang dan jasa yang diimpor, maka akan sama dengan jumlah penggunaan akhir barang dan jasa yang berasal dari faktor produksi lokal atau domestik.



Gambar 8. Pertumbuhan Konsumsi Akhir pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Tabel 8. Pertumbuhan Konsumsi Akhir pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

		(Milyar Rupiah)			
No	Konsumsi Akhir	1993	2000	2004	2007
1	Konsumsi rumah tangga	1 623 751,47	5 954 869,51	117 564,51	233 891,21
2	Konsumsi pemerintah	380 428,64	1 047 198,62	19 450,22	6 202,92
3	Pembentukan modal tetap	491 565,81	1 576 440,70	31 511,95	11 556,02
4	Perubahan stok	92 374,20	344 448,98	1 073,49	72 465,87
5	Ekspor	1 610 745,50	5 826 437,83	92 317,64	14 618 766,02
Total		4 198 865,63	14 749 395,64	261 917,81	14 942 882,04

Tabel 9. Pertumbuhan Konsumsi Akhir Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

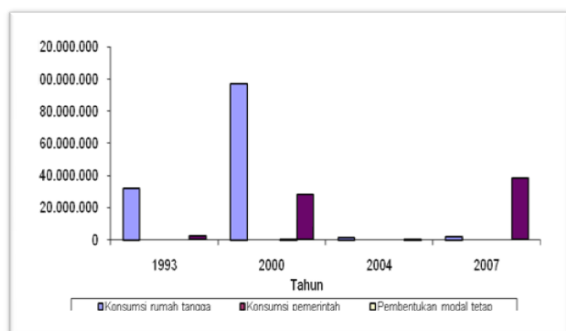
		(Milyar Rupiah)			
No	Konsumsi Akhir	1993	2000	2004	2007
1	Konsumsi rumah tangga	31 906,74	96 789,64	1 399,52	1 894,49
2	Konsumsi pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembentukan modal tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perubahan stok	0,00	783,67	0,00	0,00
5	Ekspor	2 598,33	28 322,82	242,18	38 349,29
Total		34 505,07	125 896,13	1 641,70	40 243,78

Tabel 10. Pertumbuhan Perdagangan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

		(Milyar Rupiah)			
No	Perdagangan	1993	2000	2004	2007
1	Ekspor	1 610 745,50	5 826 437,83	92 317,65	14 618 766,02
2	Impor	800 974,71	2 974 145,75	68 482,55	12 795 253,08
3	Neraca Perdagangan	809 770,79	2 852 292,08	23 835,10	1 823 512,95

Tabel 11. Pertumbuhan Perdagangan Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

		(Milyar Rupiah)			
No	Perdagangan	1993	2000	2004	2007
1	Ekspor	2 598,33	28 322,82	242,18	38 349,29
2	Impor	1 650,12	6 642,34	33,95	6 344,06
3	Defisit Perdagangan	948,21	21 680,48	208,22	32 005,23

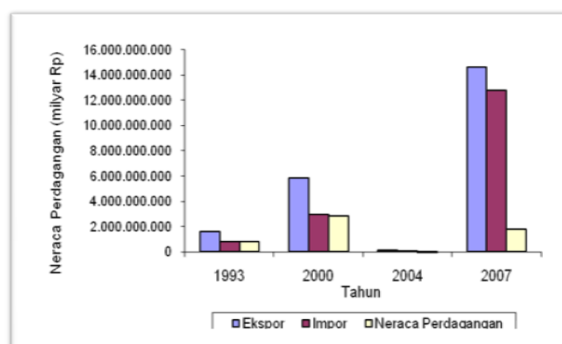


Gambar 9. Pertumbuhan Konsumsi Akhir Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Secara umum, pertumbuhan konsumsi akhir pada perekonomian Jawa Tengah pasca pemberlakuan otonomi daerah mengalami penurunan (Tabel 8). Hal yang sama terjadi pada konsumsi akhir sektor perikanan pada perekonomian Jawa Tengah (Tabel 9 dan Gambar 9).

Pertumbuhan perdagangan pada perekonomian Jawa Tengah sebelum dan setelah pemberlakuan otonomi daerah mengalami fluktuasi baik pada kegiatan ekspor, impor, maupun pada neraca perdagangan (Tabel

10 dan Gambar 10). Sementara itu, pertumbuhan perdagangan sektor perikanan pada perekonomian Jawa Tengah sebelum dan setelah pemberlakuan otonomi daerah baik dari segi ekspor, impor dan defisit perdagangan juga berfluktuasi (Tabel 11 dan Gambar 11).

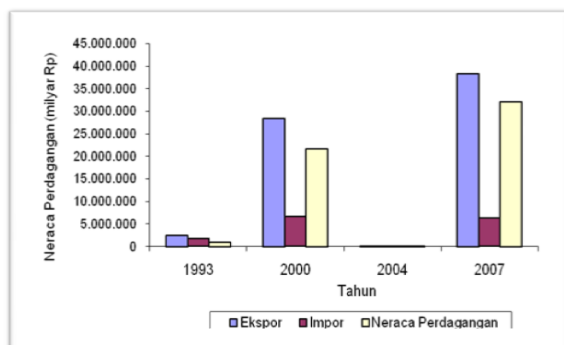


Gambar 10. Pertumbuhan Perdagangan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Struktur Perdagangan

Perdagangan antar wilayah, khususnya antara propinsi Jawa Tengah dengan propinsi yang lain dalam wilayah Indonesia, dapat dilihat pada struktur penawaran dan permintaan sektor produksi di Jawa Tengah. Struktur permintaan

terhadap barang dan jasa di Jawa Tengah memberikan gambaran berapa banyak barang dan jasa yang berasal dari Jawa Tengah dipergunakan oleh Jawa Tengah sendiri, barang dan jasa yang diekspor ke wilayah lain di Indonesia, dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi dan konsumsi akhir. Sedangkan dari sisi penawaran memperlihatkan berapa besar output barang dan jasa yang diproduksi oleh Jawa Tengah dan berapa barang dan jasa yang diimpor dari daerah lain di Indonesia dan dari luar negeri.



Gambar 11. Pertumbuhan Perdagangan Sektor Perikanan pada Perekonomian Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Pemberlakuan otonomi daerah berdampak terhadap menurunnya permintaan, penawaran, output, nilai tambah dan neraca perdagangan pada perekonomian Jawa Tengah.
2. Pemberlakuan otonomi daerah juga telah berdampak terhadap menurunnya permintaan, penawaran, output, nilai tambah dan neraca perdagangan pada sektor perikanan di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistika. 1995. Tabel Input Output Indonesia Tahun 1995. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistika. 2000. Tabel Input Output Jawa Tengah 2000. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Badan Pusat Statistika Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

_____. 2003. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

_____. 2004. *Tabel Input Output Jawa Tengah 2004*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

_____. 2006. *Jawa Tengah dalam Angka 2006*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

_____. 2008. *Jawa Tengah dalam Angka 2006*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Jensen, R.C. and G.R.West. 1986. Input Output for Practioners : Theory and Applications. Australia Government Publishing Service, Canberra.

Jhingan, M.L. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Press, Jakarta.

Mangiri, K. 2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom (Pendekatan Model Input Output). Edisi Kedua. Badan Pusat Statistik, CV. Nasional Indah, Jakarta.

Republik Indonesia. 1974. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

_____. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. 2004. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

_____. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mayrowani H. 2006. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 3. 212-225. Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Permintaan pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004, dan 2007

(juta rupiah)

No Sektor	Permintaan antara				Permintaan akhir			Jumlah Permintaan				
	1993	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007
1	243096741	1055733575	11593149,47	14466910,46	30669001	1943720	7780,46	8787359,67	273765742	1057677295	11600929,93	23254270,13
2	89598542	255226666	3425101,92	6447100,51	192432105	1015682236	15179123,80	693526582,60	282030647	1270908902	18604225,72	699973683,10
3	68056618	165912811	3458320,92	9894933,49	19100464	185940182	1050942,10	28691695,41	87157082	351852993	4509263,02	38586628,89
4	38002688	230641502	1266059,66	2261267,41	109162295	168404195	6831534,27	252120064,53	147164983	399045697	8097593,93	254381331,94
5	13707503	72943215	825142,97	1111082,34	57909094	110981743	64418,98	75292026,27	71616597	183924958	889561,95	76403108,61
6	16127757	114106170	814760,8	1517538,74	3450568	125896125	1641700,13	40243780,08	19578325	240002295	2456460,93	41761318,82
7	41421550	114801181	2841875,06	97883892,50	6847996	20388374	-567566,01	40081174,34	48269546	135189555	2274309,05	137965066,84
8	149843893	922561939	13141425,6	24207413,22	778911091	3442936621	60294842,73	4196727763,22	928754984	4365498560	73436268,33	4220935176,44
9	509163499	1484280068	28231980,01	69719943,02	974166645	2405394993	40378623,83	3420600312,41	1483330144	3889675061	68610603,84	3490320255,43
10	103478262	214504637	11276999,25	15753395,35	428725072	1504637473	38915941,64	3545909087,15	532203334	1719142110	50192940,89	3561662482,50
11	46364179	108882444	4565589,81	8784310,43	22797741	106308354	2422149,20	2662242,30	69161920	215190798	6987739,01	11446552,74
12	17564133	133896296	2884710,71	5549547,00	382203309	951184721	26391623,17	7885847,12	399767442	1085081017	29276333,88	13435394,12
13	243849595	815877786	26148285,14	35560984,99	455495423	1541975386	23052684,83	2255630356,66	699345018	2357853172	49200969,97	2291191341,65
14	29670759	153651198	10449772,53	20102869,57	151220076	744585157	3047709,32	3340888,15	180890835	898236355	13497481,85	23443757,73
15	87373562	422718163	10901479,13	18413989,27	113987013	388622558	8429624,07	348236007,43	201360575	811340721	19331103,20	366649996,70
16	142062571	502015313	3729639,56	7174263,52	64048002	599261356	5664169,88	6173479,02	206110573	1101276669	9393809,44	13347742,54
17	0	11271262	635459,14	1222729,74	307666358	1093776660	24727294,53	11923977,55	307666358	1105047922	25362753,67	13146707,29
18	47272949	150609663	2440680,68	4695563,66	690188775	341475787	4385211,60	5049401,04	737461724	492085450	6825892,28	9744964,70
19	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	1886654801	6929633889	138630432,36	344767735,22	4788981028	14749395641	261917808,53	14942882044,94	6675635829	21679029530	400548240,89	15287649780,16

Lampiran 2. Struktur Penawaran pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004, dan 2007

(juta rupiah)

No Sektor	Output Lokal				Impor total			Jumlah Penawaran				
	1993	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007
1	14862546	75468469	1441248,75	3264396,72	16271463	59738650	253436,20	47351924,42	31134009	135207119	1694684,95	50616321,13
2	17386775	74712241	1386135,03	3136927,43	8041303	60638892	212670,32	39735242,71	25428078	135351133	1598805,35	42872170,14
3	10501054	26897111	552077,48	2008317,22	4717722	25737002	382661,14	71496263,67	15218776	52634113	934738,62	73504580,89
4	39439969	158347962	2701203,75	5042382,98	1476928	5863905	103062,44	19256147,58	40916897	164211867	2804266,19	24298530,55
5	9326787	21272906	135146,98	725949,18	1038141	4839994	14447,07	2699285,13	10364928	26112900	149594,05	3425234,32
6	6591092	33931242	449870,12	1271968,86	1650123	6642344	33954,60	6344064,71	8241215	40573586	483824,72	7616033,57
7	5972052	16347152	354919,15	1165428,41	1536051	4761643	64260,29	12006368,45	7508103	21108795	419179,44	13171796,86
8	539030825	2461460234	39384430,14	77347233,97	61000734	312977501	8024938,78	1499376547,44	600031559	2774437735	47409368,92	1576723781,40
9	681438143	1785619550	31697295,92	80351619,96	309340146	1004500680	17583118,04	3285223170,26	990778289	2790120230	49280413,96	3365574790,22
10	35548591	111437850	79371,37	53032324,66	294503214	998745231	32334075,42	6041286506,59	330051805	1110183081	32413446,79	6094318831,24
11	33352972	80027904	772088,01	7980078,70	12967477	48146511	3853737,65	720030895,04	46320449	128174415	4625825,66	728010973,74
12	179531240	438692793	16022084,07	30278685,97	59759141	167587964	2355118,15	440029390,55	239290381	606280757	18377202,22	470308076,52
13	98781797	460937159	16341385,89	27973821,73	6081072	47269868	559147,10	104470834,14	104862869	508207027	16900532,99	132444655,87
14	91839911	440920473	6406670,33	11606301,14	3266496	35842823	448260,46	83752815,98	95106407	476763296	6854930,79	95359117,11
15	64502568	252630621	7688652,75	14079257,18	9001642	40553868	683121,04	127634078,53	73504210	293184489	8371773,79	141713335,71
16	34065666	129780156	2160226,25	4157688,32	1672633	33953535	93047,23	17384909,50	35738299	163733691	2253273,48	21542597,83
17	0	256923623	8990895,82	16761363,77	0	71731427	1026619,87	191813270,91	0	328655050	10017515,69	208574634,67
18	24482813	104226443	2066730,55	4583989,04	41189846	44613907	456869,68	85361359,41	65672659	148840350	2523600,23	89945348,45
19	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	1886654801	6929633889	138630432,36	344767735,22	833514132	2974145745	68482545,48	12795253075,00	2720168933	9903779634	207112977,84	13140020810,22

Lampiran 3. Struktur Nilai Tambah Sektor pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004, dan 2007

(juta rupiah)

No Sektor	Upah dan gaji				Surplus usaha			
	1999	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007
1	43962871	162873952	1460935,85	2815079,86	192242363	735714889	8110125,20	15627414,5
2	32376450	150858730	2601476,5	3106698,25	218840741	972724536	14169619,37	16921441,21
3	24226291	59738555	943361,85	2368957,72	45292532	111566855	2429414,93	6100714,44
4	21411718	66760845	1794601,41	1622361,29	81666515	278222846	3335101,04	3015008,68
5	12658635	34129467	153160,77	99822,6418	44023256	115442110	530765,62	345926,87
6	7762447	36630007	377068,15	409070,392	32892636	153100797	1475595,53	1600831,16
7	14012565	38922797	628740,38	32575539,3	21491168	63126768	990870,63	51337795,63
8	72648680	321089766	4687778,25	2399852,32	123414226	812526879	8531625,69	4367664,29
9	161988940	338963980	6599590,5	14692623,5	246795038	550694622	9532329,57	21221760,52
10	25864429	92206898	4038935,92	1111234,75	141759045	421416456	9815874,08	2700647,06
11	6932242	19685911	640438,82	939943,261	9780109	33688624	1386839,01	2035401,26
12	89515676	261300055	5098311,55	1815181,6	52661752	158176770	3736349,38	1330274,26
13	108046476	415201386	7220385,39	7283354,49	425980487	1199608521	21071565,30	21255330,77
14	20822621	154877989	1874664,22	3340773,16	52552466	209104476	3823743,02	6814157,93
15	34358809	132575183	2748959,28	3386672,15	65239494	270711250	4450331,66	5482734,64
16	42699164	196516981	636184,2	818785,498	108544478	608790747	5608393,56	7218147,37
17	293015579	739046962	14608232,1	10727844	0	0	0,00	0,00
18	41189846	167955079	2337692,18	2662246,88	32485447	118704106	1444455,60	1644997,34
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1053493439	3389334543	58450517,29	92176040,99	1895661753	6813321252	100442999,19	169020247,94

Lampiran 4. Struktur Nilai Tambah pada Perekonomian Jawa Tengah, Tahun 1993, 2000, 2004, dan 2007

(juta rupiah)

No Sektor	Subsidi				Jumlah			
	1999	2000	2004	2007	1999	2000	2004	2007
1	0	0	0,00	0,00	242631733	922470176	9906244,98	985798757,99
2	0	0	0,00	0,00	256602569	1135357769	17005420,37	1243437077,00
3	0	0	0,00	0,00	71938306	177972734	3574524,40	177553660,65
4	0	0	0,00	0,00	106248086	356078976	5293327,74	382438524,35
5	0	0	0,00	0,00	61251669	157812058	739967,90	173344716,74
6	0	0	0,00	0,00	42391610	199428409	1972636,21	201163201,36
7	0	0	0,00	0,00	40761443	114080760	1855129,61	199248985,17
8	0	0	0,00	0,00	328723425	1591061125	26026899,41	1560709402,73
9	-10478044	-265925	-46031,91	-102480,53	492551855	1099554831	19330189,88	1146919053,71
10	0	0	0,00	0,00	202151529	608959029	17779494,10	711671491,58
11	0	0	-969681,23	-1423157,54	22841471	87016383	2361913,35	88427671,56
12	0	0	0,00	0,00	160477061	478800260	10899131,66	298142915,52
13	0	0	0,00	0,00	594482149	1849646145	32300436,98	1978542639,22
14	0	0	0,00	0,00	85784428	421473059	6642551,06	348162248,43
15	0	0	-9473,40	-11671,07	127856365	518155832	10959329,41	500790316,82
16	0	0	0,00	0,00	170372274	937542978	7140535,96	884393544,98
17	0	0	0,00	0,00	307666358	776392872	15345237,98	64002807,75
18	0	0	0,00	0,00	83158585	343245100	4302292,05	224122998,85
19	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	38,00
	-10478044	-265925	-1025186,54	-1537309,14	3397890916	11775048496	11228857498,85	11168869672,42

Keterangan :

No Sektor	Nama Sektor
1	Padi
2	Tanaman Bahan Makanan
3	Tanaman Pertanian lainnya
4	Peternakan dan Hasil-hasilnya
5	Kahutanan
6	Perikanan
7	Pertambangan dan Penggalan
8	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
9	Industri lainnya

No Sektor	Nama Sektor
10	Industri Penggilingan Minyak
11	Listrik, Gas dan Air Minum
12	Bangunan
13	Perdagangan
14	Restoran dan Hotel
15	Pengangkutan dan Komunikasi
16	Lembaga Keuangan, Reak Estate dan Jasa Perusahaan
17	Pemerintahan Umum dan Pertahanan
18	Jasa-Jasa
19	Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya